

**ANALISIS PENGARUH UMK DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI JAWA TIMUR**

JURNAL ILMIAH

**Disusun Oleh:
Andi Hermawan
(125020100111089)**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

ANALISIS PENGARUH UMK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

Andi Hermawan*, Dwi Budi Santoso**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: andih8471@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 dan 2016. Kemiskinan merupakan isu nasional dimana tiap provinsi memiliki strategi yang berbeda beda untuk menyikapinya. Jawa timur merupakan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu pada posisi kelima dan posisi kedua menurut jumlah penduduk tiap provinsi di Indonesia. keadaan demografi tersebut menyebabkan Jawa Timur menjadi Provinsi yang sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dikarenakan melimpahnya Sumber Daya Manusia yang tersedia. Namun pada kenyataannya di Provinsi Jawa Timur pada satu dekade terakhir menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan nasional, yaitu 10.85 persen pada tahun 2018 dan UMK provinsi Jawa Timur masih berada dibawah rata rata nasional padahal pertumbuhan cenderung selalu berada diatas nasional. Penelitian menggunakan data panel 38 kabupaten/kota pada tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan bukti bahwa kenaikan upah minimum dan investasi dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur, namun terdapat elastisitas daerah dengan IPM yang tinggi cenderung memerlukan kenaikan yang tinggi untuk dapat menurunkan kemiskinan dibandingkan daerah dengan IPM rendah. Maka dari itu, peningkatan UMK masih dapat dilakukan namun dengan mempertimbangkan karakteristik tiap daerah.
Kata kunci: Kemiskinan, UMK, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi.

A. PENDAHULUAN

Terciptanya pembangunan merupakan tujuan tiap negara dalam mengelola negaranya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan, adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi ialah seberapa efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan *benchmark* umum untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Sehingga, nampak wajar bila negara-negara berkembang sedang bersaing mengejar ketertinggalan dari negara maju. Dengan demikian, dalam rangka mengejar hal tersebut maka percepatan pertumbuhan menjadi prioritas utama di kalangan negara berkembang. Pada tahun 2014 menjadi titik awal perubahan dengan tergesernya ekonomi terbesar dunia dari Amerika Serikat kepada Tiongkok. PDB Tiongkok, berdasarkan PPP, pada tahun 2014 sudah menembus 18,1 triliun dolar AS, sedangkan AS 17,3 triliun dolar AS.

Kendatipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berdampak pada semakin besarnya kesempatan kerja pada suatu negara. Adanya peningkatan lapangan pekerjaan (*labour demand*) diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya dapat menurunkan kemiskinan.

Sharp et al dalam Kuncoro (2010) menyatakan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Dengan demikian, dalam mengukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan dapat pula ditinjau dari rendahnya angka kemiskinan. Semakin rendah angka kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik.

Bagi Indonesia, memerangi kemiskinan harus membutuhkan upaya ekstra kedepan. Meskipun dalam satu dekade terakhir Indonesia telah berhasil menurunkan presentase kemiskinan dari

16,13% pada tahun 2008 menjadi 9,82% pada tahun 2018 dengan total 25,95 juta jiwa, namun pengukuran tersebut menggunakan standar negara berpendapatan rendah berdasarkan world bank yaitu 1,9 dollar per hari. Padahal, Indonesia telah beralih menjadi negara berpendapatan menengah dengan garis kemiskinan ekstrim dan moderat sebesar 3,2 dollars. Artinya, jika kemiskinan telah dikonversikan sesuai dengan kategori terbaru, maka angka kemiskinan akan naik menjadi 70 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan GNP tidak berdampak elastis terhadap penurunan kemiskinan.

Azis (2012) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam proses pembangunan Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik melalui subsidi, bantuan kredit murah, dan penentuan upah minimum. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 88 Ayat 1-2, "*Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh*". Spesifik dalam penentuan upah minimum, aturan tersebut memiliki peran yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi pekerja dan buruh. Selain bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi dan produktifitas, upah minimum juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar mereka terbebas dari jurang kemiskinan.

Sungguhpun begitu, peningkatan upah buruh menjadi konsekuensi logis ketika terjadi pertumbuhan ekonomi. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi upah yang diterima oleh pekerja. Hal ini kemudian berdampak pada dua hal. *Pertama*, semakin tinggi penetapan upah pada sektor formal, maka keinginan tenaga kerja untuk memasuk pasar kerja semakin besar. Bahkan tenaga kerja pada sektor formal, yang umumnya memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan sektor formal, akan tertarik untuk memasuk pasar tenaga kerja. *Kedua*, semakin tinggi upah buruh akan meningkatkan hasrat untuk menghasilkan produktivitas dan daya saing lebih tinggi.

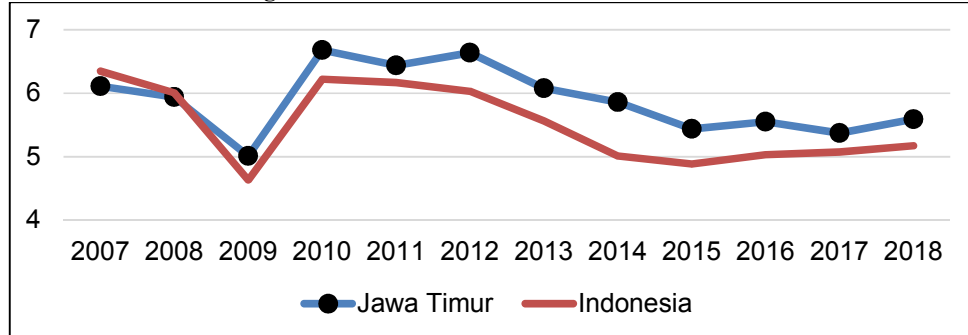
Dalam survei Daya Saing Ekonomi (*Global Competitiveness Index*) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengalami penurunan peringkat secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Faktor efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia yang mengalami penurunan paling tajam. Salah satu faktor penentu efisiensi pasar tenaga kerja adalah upah buruh semakin murah yang akan memberikan kontribusi semakin besar dalam menurunkan biaya produksi. Upah masih tetap menjadi persoalan utama negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan pasar kerja Indonesia yang dualistik dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di lain sisi sehingga menyebabkan upah menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan. Upah minimum menjadi perhatian banyak kalangan dalam upaya perlindungan perburuhan dalam bentuk perundang-undangan perburuhan.

Berdasarkan publikasi BPS (2017), terdapat perbedaan karakteristik antar provinsi khususnya menenai pertumbuhan, upah, dan kemiskinan. Paling tidak, karakteristik yang dapat ditangkap dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (i) pertumbuhan tinggi, UMP tinggi, dan kemiskinan rendah; (ii) pertumbuhan tinggi, UMP rendah, dan kemiskinan tinggi; serta (iii) pertumbuhan rendah, UMP tinggi, dan kemiskinan tinggi. Pada kelompok pertama, rendahnya kemiskinan diduga merupakan dampak dari tingginya pertumbuhan atau UMP. Dimana, kondisi ini sesuai dan telah dijelaskan sebelumnya. Provinsi yang tergolong dalam kelompok pertama adalah Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah. Pada kelompok kedua dan ketiga, karakteristik kemiskinan serupa yaitu lebih tinggi dibandingkan angka nasional, namun memiliki perbedaan dalam segi pertumbuhan dan UMP. Pada kelompok kedua, meskipun memiliki pertumbuhan yang tinggi, namun UMP tergolong rendah. Sedangkan pada kelompok ketiga, meskipun memiliki pertumbuhan yang rendah, hal tersebut tidak menjadi batasan untuk menetapkan UMP yang tinggi. Kelompok kedua dan ketiga menunjukkan bahwa tingginya kemiskinan dapat terjadi ketika UMP rendah maupun tinggi. Provinsi yang tergolong dalam kelompok kedua adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi yang tergolong dalam kelompok ketiga adalah Aceh, Bengkulu, Papua, dan Papua Barat.

Spesifik pada Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 39.293.000 jiwa dan merepresentasikan 15 persen dari total penduduk Indonesia menjadikan Jawa Timur memiliki penawaran tenaga kerja yang besar. Tingginya jumlah penduduk tersebut menyebabkan tingginya penawaran tenaga kerja setiap tahun. Jika tidak dibarengi dengan

penambahan lapangan kerja yang memadai maka akan berimplikasi terhadap meningkatnya pengangguran. Sungguhpun demikian, ditinjau dari pertumbuhan ekonomi maka peningkatan lapangan kerja masih memungkinkan untuk dilakukan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,59 persen, atau 0,42 persen lebih tinggi dari nasional. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi semakin baik. Menurut Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Lebih lanjut, Hasan dan Quibria (2002); Sumarto (2002); dan Tambunan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output pada gilirannya akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan gaji riil.

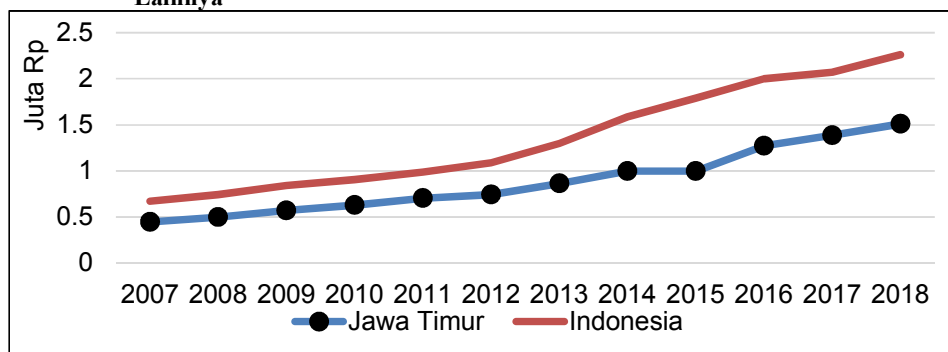
Gambar 1.1: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa dalam satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional tersebut nampaknya tidak berdampak pada penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur. Dalam sepuluh tahun terakhir, UMP Jawa Timur memang menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun gap dengan rata-rata upah daerah lain justru semakin melebar. Artinya, peningkatan UMP Jawa Timur masih belum mampu bergerak cepat mengikuti tingginya pertumbuhan ekonomi.

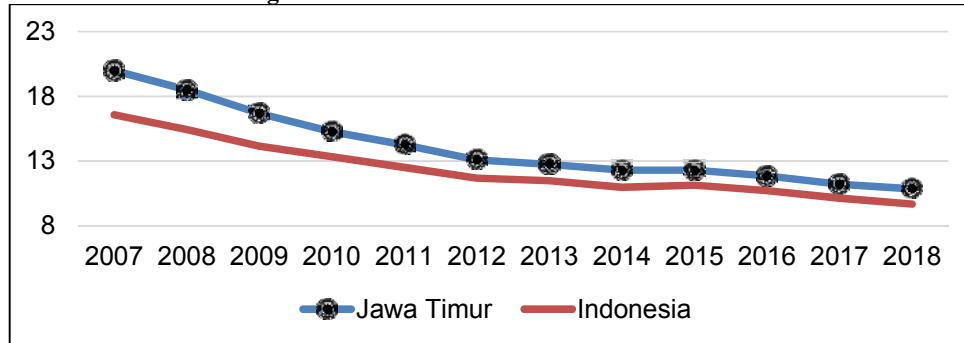
Gambar 1.2: Perkembangan UMP Jawa Timur dan Rata-Rata Upah Minimum Daerah Lainnya



Sumber: BPS (2019) dan Berbagai Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang UMK, diolah

Pada sisi lainnya, kemiskinan di Jawa Timur masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2018 kemiskinan nasional berada pada angka 9,82 persen, sedangkan Jawa Timur sendiri masih berada di kisaran 10,85 persen. Meskipun kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan penurunan sepanjang tahun, dapat diketahui bahwa mulai terjadi perlambatan sejak tahun 2013. Hal ini menandakan perlu adanya upaya ekstra dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Timur. Selain tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tampaknya peningkatan upah menjadi salah satu alternatif dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur.

Gambar 1.3: Perkembangan Kemiskinan Jawa Timur dan Nasional



Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan Gambar 1.2 dan Gambar 1.3, tingkat UMP seolah-olah berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Sejak tahun 2013, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan pada tahun yang sama gap upah minimum justru menunjukkan semakin besar. Dalam konteks ini, maka semakin besar upah minimum diduga akan berpengaruh negatif dengan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, berdasarkan pengelasan latar belakang tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah upah minimum efektif dalam menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kesejahteraan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan. Penurunan kemiskinan yang berjalan lambat mengindikasikan bahwa proses pembangunan masih belum efektif. Sehingga, perlu dilakukan upaya ekstra dalam mengatasi kemiskinan. Pada sisi yang lain, UMP Jawa Timur meskipun menunjukkan kecenderungan yang meningkat namun kesenjangan dengan daerah lainnya justru semakin lebar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Upah Minimum

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (i) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (ii) meningkatkan produktivitas pekerja, (iii) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut (Suryahadi et al, 2003). Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir tahun 1980an. Hal ini terutama disebabkan adanya tekanan dari dunia internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Di masa tersebut, sebuah organisasi perdagangan Amerika Serikat (AFL-CIO) dan beberapa aktivis hak asasi manusia mengajukan keberatan terhadap sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat beroperasi di Indonesia yang diduga memberikan upah yang sangat rendah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang berada dibawah standar (Gall, 1998 dan Suryahadi dkk 2003). Sebagai hasilnya, kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan upah minimumnya dengan menaikkan upah minimum sampai dengan tiga kali lipat dalam nilai nominalnya (dua kali lipat dalam nilai riil).

Pada awalnya kebijakan upah minimum ditetapkan berdasarkan besaran biaya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Dalam perkembangannya kemudian, dalam era otonomi daerah, dalam menentukan besaran tingkat upah minimum beberapa pertimbangannya adalah: (i) biaya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), (ii) Indeks Harga Konsumen (IHK), (iii) tingkat upah minimum antar daerah, (iv) kemampuan, pertumbuhan, dan keberlangsungan perusahaan, (v) kondisi pasar kerja, dan (vi) pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Dengan berbagai kondisi empiris dan penjelasan tentang implementasi dari kebijakan upah minimum diatas, sebenarnya segala produk hukum termasuk kebijakannya tidak boleh melenceng dari prinsip dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula dengan kebijakan upah minimum harus mengacu pada UUD tersebut yang secara jelas dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebutlah yang seharusnya dijadikan standar baku bagi penetapan upah minimum. Meskipun demikian, disamping penghidupan yang layak bagi pekerja beberapa perhitungan perlu dilakukan dalam menentukan tingkat upah

minimum, seperti misalnya menjaga produktivitas usaha dan keberlanjutan kondisi ekonomi nasional (dan daerah) (Hendrani, 2002).

Dengan kata lain, kebijakan upah minimum harus ditetapkan untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan yang bisa mengancam keberlanjutan kondisi ekonomi dan produktivitas nasional (dan daerah). Penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan upah minimum berusaha memenuhi kedua kepentingan tersebut tetapi tetap sesuai dengan UUD 1945 khususnya pasal 27.

Menurut UU 13/2003 Pasal 1 ayat (30), upah dapat diartikan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sedangkan dalam teori ekonomi, upah diuraikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dimana, upah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (i) upah nominal dan (ii) upah riil.

Upah Nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Dengan demikian, upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan. Upah tersebut dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output, seperti misalnya tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar pada senioritas.

Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu adalah: (i) upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja dan (ii) jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Sumarsono (2003) mengemukakan pula bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Namun kenyataannya justru menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang secara sadar dan sukarela terus menerus berusaha meningkatkan penghidupan karyawannya, terutama pekerja golongan yang paling rendah. Di pihak lain, karyawan melalui serikat pekerja dan/atau dengan mengundang pemerintah selalu menuntut kenaikan upah. Tuntutan seperti itu yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja akan mendorong pengusaha untuk: (i) mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi; (ii) menggunakan teknologi yang lebih padat modal; dan/atau (iii) menaikkan harga jual barang yang kemudian justru akan mendorong inflasi (Sumarsono, 2003).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999, paling tidak ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia. Pertama, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Kedua, upah minimum wajib dibayar kepada pekerja secara bulanan atau dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan atau upah dua mingguan. Ketiga, besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum. Keempat, upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun. Kelima, peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha. Keenam, pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah-rendahnya adalah sebesar upah minimum untuk upah bulannya. Ketujuh, upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran (dengan pro rata basis). Kedelapan, perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak diperbolehkan menurunkan upah. Kesembilan, dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang

ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha. Terakhir, pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah pemerintah mengatur kebijakan ketenagakerjaannya, termasuk didalamnya kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain: (i) Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak; (ii) Upah Minimum dapat diterapkan: (a) berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, (b) berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional. Upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan; (iii) Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota; (iv) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetap tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang notabene menarget sektor formal tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja saja, namun juga bisa mempengaruhi sektor-sektor kecil seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang kebanyakan masih bersifat informal.

Sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerjakota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi (Mulyana, 2011). Menurut Alma (2001) memberikan pengertian bahwa, istilah sektorinformal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyedatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan.

Dalam teori penawaran tenaga kerja mempunyai ide bahwa "Leisure" mempunyai utility terhadap manusia. Maka jumlah waktu kerja untuk konsumen dapat diturunkan dari analisis utility maximization dengan asumsi leisure dan pendapatan dapat saling bertukar satu sama lain. Dampak dari upah dibagi dua yaitu income effect dan price effect. Jika leisure dapat dianggap sebagai barang dan jasa maka peningkatan upah dapat meningkatkan leisure atau penurunan penawaran tenaga kerja. Menurut Kaufman & Hotchkis (1999), pengaruh perubahan tingkat upah terhadap jam kerja individu menimbulkan dua pengaruh yang berbeda, yaitu tingkat upah akan naik jika seseorang bekerja dengan jam kerja yang sama sebelumnya tetapi pendapatannya lebih tinggi yang selanjutnya dapat menimbulkan apa yang disebut efek pendapatan. Kenaikan tingkat upah akan membuat waktu luang menjadi lebih mahal, waktu yang lebih tinggi cenderung membuat orang mensubstitusikan waktu leisurennya dengan lebih banyak bekerja inilah yang disebut effect substitusi. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh G.S. Becker (dalam Rochaeni, 2005), kepuasan individu dapat diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (leisure). Sering kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Wirosuhardjo dkk (1986) mengemukakan sebuah hipotesis bahwa rumah tangga yang berpendapatan rendah (*poor family*) di negara berkembang mempunyai suatu target level dari *income* (FY) sejalan dengan tingkat *subsistence*. Dia menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja wanita kawin akan tergantung kepada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan target *income* tersebut. Jika pendapatan suami berada di bawah target *income*, isteri akan bekerja lebih banyak untuk mencapai kebutuhan *subsistence* tersebut. Semakin dekat pendapatan rumah tangga kepada garis target *income* tersebut, semakin berkurang keinginan isteri untuk bekerja, atau semakin sedikit jumlah jam kerjanya di pasar tenaga kerja. Target *income* tersebut disebutkannya sebagai "Threshold Hypothesis".

Teori keputusan untuk bekerja (*A Theory of the Decision to Work*) merupakan pengaturan alokasi waktu kerja dan *leisure*. Keputusan itu sangat dipengaruhi oleh adanya *non labor income*, tingkat upah, dan karakteristik lainnya. Suatu keputusan untuk bekerja pada akhirnya merupakan keputusan tentang bagaimana menghabiskan waktu yang tersedia secara absolut. Dalam aktivitas sehari-hari terdapat pilihan secara pasti yakni apabila dia menggunakan waktu untuk menambah *leisure time*, maka akan mengurangi waktu untuk bekerja. Setiap individu harus memutuskan berapa jam untuk bekerja dan berapa jam untuk mengkonsumsi berbagai barang dan berapa banyak curahan waktu untuk aktivitas rumah tangga lainnya, seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (*household production*). Jadi, pilihan yang dapat

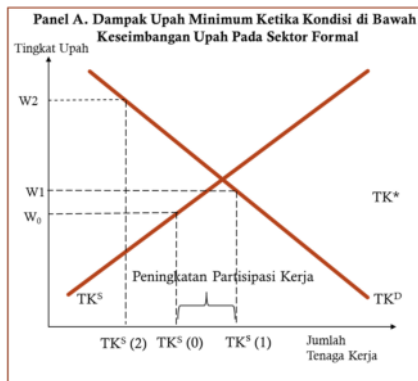
digunakan untuk mendatangkan pendapatan guna membeli barang konsumsi, yakni bekerja di pasar.

Ehrenberg and Smith (2000), dalam teori keputusan untuk bekerja mengasumsikan adanya waktu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, seperti menghabiskan waktu untuk makan, tidur, dan lain-lain, pada umumnya sebanyak 8 jam per hari. Sisa waktu masih 16 jam per hari dapat dialokasikan untuk bekerja atau *leisure*. Permintaan waktu untuk *leisure* dapat dipertimbangkan sebagai suatu kebalikan dari jumlah waktu yang ditawarkan untuk bekerja.

Ada beberapa konsep dasar dalam menganalisis dorongan bekerja dalam konteks permintaan waktu *leisure*, hal ini mengandung pengertian yang sama dengan mempelajari suatu faktor yang mempengaruhi permintaan bermacam barang. Secara mendasar, permintaan suatu barang adalah suatu fungsi dari tiga faktor yakni: a) suatu *opportunity cost of good* (dimana selalu sama dengan harga pasar); b) salah satu dari tingkat kesejahteraan; dan c) salah satu dari kumpulan beberapa pilihan.

Perhitungan nilai *opportunity cost* tersebut, dapat digunakan untuk memperhitungkan pendapatan ekstra dari pekerja dalam rumah tangga. Untuk mengukur *opportunity cost* dari waktu *leisure* dipengaruhi oleh pendapatan tenaga kerja dan *non labor income*. Di samping itu, adanya penekanan pengukuran biaya marjinal dari *leisure* disebabkan adanya keputusan penawaran kerja dan dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kesejahteraan.

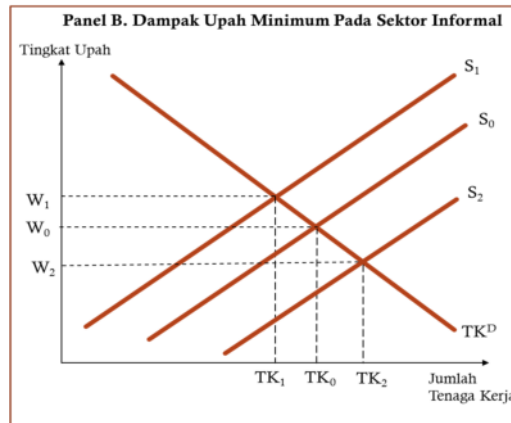
Gambar 2.1: Dampak Upah Minimum Ketika Kondisi di Bawah Keseimbangan Upah Pada Sektor Formal



Sumber: Tambunan (2016)

Dari kurva diatas dapat dilihat pergeseran titik untuk menggambarkan effect *leisure* pada pasar tenaga kerja. Pada titik keseimbangan keadaan riil lapangan menunjukkan bahwa upah dan jumlah tenaga kerja berada dibawah titik keseimbangan. Pada saat titik bergeser dari titik W_0 ke W_1 . Hal tersebut terjadi karena adanya upaya untuk menciptakan *opportunity cost* dimana para tenaga kerja mengorbankan *leisure* yang dia punya untuk bekerja, hal tersebut didasari pada minimnya penghasilan dibandingkan pengeluaran, maka banyak orang yang memasuki pasar tenaga kerja menyebabkan TK_0 berpindah ke TK_1 . Hal tersebut berdampak positif bukan hanya kepada industry namun juga kepada para pekerja karna mereka sama sama mendapat keuntungan dibawah garis keseimbangan. Berbeda halnya ketika titik W_1 ber pindah ke W_2 menyebabkan terjadinya defisit penawaran tenaga kerja. Keadaan ini menggeser garis TK_1 ke TK_2 , salah satu faktor utama terjadinya hal tersebut adalah tercukupinya upah yang membuat terciptanya *opportunity cost* untuk merubah pola kerja untuk lebih memprioritaskan *leisure*.

Gambar 2.2: Dampak Upah Minimum Ketika Kondisi di Bawah Keseimbangan Upah Pada Sektor Informal



Sumber: Pratomo dan Saputra (2011)

Pengaruh leisure pada pasar tenaga kerja tidak berhenti sampai pada sektor formal saja. pada kurva diatas dijelaskan titik W0 telah bergeser ke W1 dikarenakan perpindahan tenaga kerja di sektor informal ke sektor formal, kenaikan upah pada gambar 2.1 di titik W0 ke W1 telah menyebabkan kelangkaan tenaga kerja sehingga garis TK0 berpindah ke TK1 menyebabkan garis supply bergeser dari titik S0 ke S1. Namun ketika pada sektor formal upah terlalu tinggi menyebabkan banyak tenaga Kerja berpindah ke sektor Informal dikarenakan terpuhinya leisure yang didapatkan dari upah sektor formal. Keadaan ini terjadi dikarenakan struktur pasar tenaga kerja informal yang lebih fleksibel menyebabkan mereka lebih leluasa untuk menikmati waktu senggangnya

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam Skripsi ini, metode penelitian dilandaskan pada filsafat *positivisme* dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Diaman, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Pendekatan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penyajian dari hasil penelitian juga berupa angka (Arikunto, 2010). Dengan menggunakan persamaan Persamaan Simultan – Reduced Form, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penetapan upah dalam mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.

Sebagai unit analisis dan jangka waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah 2 tahun, yaitu tahun 2012 hingga 2016. Sedangkan wilayah yang menjadi objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan rincian berupa 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersifat data panel, yaitu data yang menggabungkan data deret berkala (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Data panel yang digunakan adalah data tahun 2012 dan 2016 dengan *cross section* sebanyak 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain yang terkait.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library study*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang studi dan permasalahan yang akan diteliti kemudian dihubungkan satu sama lainnya sehingga diperoleh hasil yang akan membantu dalam menjawab permasalahan yang ada.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan nilai tertentu yang berguna untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel dependen, variabel moderating dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Di dalam penelitian ini, kemiskinan berperan sebagai variabel tidak bebas, variabel independen adalah variabel bebas yang tidak dipengaruhi variabel lainnya namun dapat mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: UMK, dan investasi, sedangkan variabel moderating adalah tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu IPM dan pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut digunakan untuk mengukur elastisitas terhadap kemiskinan di tiap kabupaten/kota Jawa Timur.

Setelah menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan pendefinisian secara operasional dari variabel tersebut. Hal ini bertujuan agar variabel tersebut dapat terukur dengan jelas secara matematis. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode Analisis Data

A. Estimasi Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis data panel. Dimana, model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda bertujuan untuk mengestimasi dampak variabel independent terhadap variabel dependen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) dan data individu (*cross section*). Menurut Zain (1999), data panel memiliki dimensi ruang dan waktu, yaitu unit individu yang sama disurvei dari waktu ke waktu. Data panel merupakan data yang sangat bermanfaat karena data jenis ini membantu peneliti untuk mendalami kegiatan pelaku ekonomi tidak hanya antara individu tetapi perilaku ekonomi lintas-waktu (Ekananda, 2016). Oleh karena penelitian ini menggunakan data panel, maka analisis modelnya menjadi model regresi data panel. Dalam model regresi data panel terdapat 3 (tiga) pendekatan yang sering digunakan, yaitu: (i) CEM, (ii) FEM, dan (iii) REM.

1. *Common Effect Model* (CEM)

Pendekatan ini disebut juga sebagai *pooled least square* (PLS). Model ini secara sederhana menggunakan seluruh data *time series* dan *cross section*. Model ini menganggap bahwa intercept dan slope dari setiap variabel adalah sama untuk semua observasi. Dibandingkan dengan dua model lainnya, model ini merupakan yang paling sederhana.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan ini memperhitungkan adanya kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables*, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dimasukkan variabel boneka (*dummy*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai yang berbeda-beda, baik *cross section* maupun *time series*. Penggunaan *dummy* membuat estimator model ini dikenal dengan *least square dummy variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan ini memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari *cross section* dan *time series*. Pendekatan REM ini adalah variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS)

Selanjutnya, untuk menentukan pendekatan/model yang akan digunakan dalam penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan uji untuk menentukan model mana yang terbaik untuk penelitian tersebut. Terdapat beberapa uji yang harus dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange multiplier. Uji Chow dilakukan untuk memilih antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM). Uji Hausman untuk memilih antara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM).

Uji Chow adalah pengujian *F-Statistics* yang memiliki hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS/(NT - N - K)}$$

Keterangan:

RRSS: Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang telah diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *Pooled Least Square/Common Effect Model*)

URSS: Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang telah diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect Model*)

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel atau dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan tingkat signifikansi (α). Jika nilai F-hitung > F-tabel atau nilai probabilitas F < tingkat signifikansi (α) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*, begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya adalah dilakukan Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Namun, Uji Hausman tidak perlu dilakukan jika hasil dalam Uji Chow menyatakan bahwa H_0 diterima yang berarti model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Sedangkan, untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) digunakan Uji Hausman. Hipotesa dalam Uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pedoman dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $\geq 0,05$ (α), maka H_0 diterima yang berarti model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$ (α), maka H_0 ditolak yang berarti model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (REM).

Sementara itu, uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk mengidentifikasi apakah *random effect model* (REM) lebih baik dari *common effect model* (CEM). Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang didasarkan pada nilai *residual* dari *common effect model* (CEM).

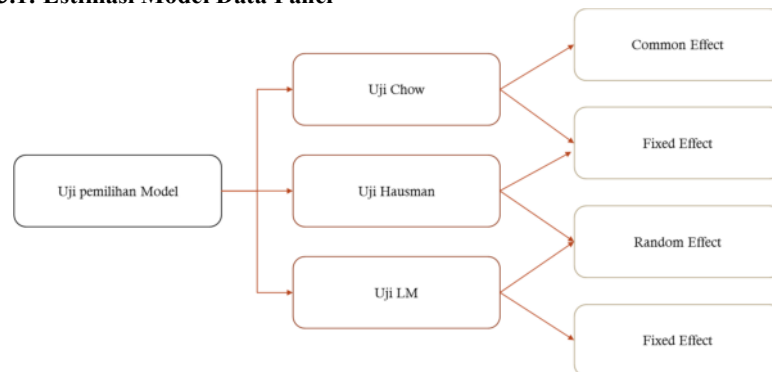
Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Square* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Square* maka H_0 ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect model* (REM). Sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Square* maka H_0 diterima yang artinya model yang tepat digunakan adalah *common effect model* (CEM). Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *probability cross-section random*. Apabila nilainya berada diatas 0,05 (tingkat signifikansi), maka H_0 diterima dan apabila nilainya berada dibawah 0,05 (tingkat signifikansi), maka H_0 ditolak. Berdasarkan penjelasan mengenai estimasi model data panel dapat disederhanakan dalam gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1: Estimasi Model Data Panel



Sumber: Zain (1999)

B. Model Analisis

Dalam penelitian ini, model persamaan simultan dipilih karena dapat menjelaskan permasalahan ekonomi yang kompleks, dimana mampu menggambarkan fenomena peningkatan UMK dan kemiskinan. Model persamaan simultan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua persamaan yaitu persamaan kemiskinan dan persamaan kecepatan pengaruh UMK dalam penurunan kemiskinan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan *reduced form* yang ditunjukkan dalam Persamaan 3.3. Pada dasarnya, Persamaan 3.3 merupakan hasil substitusi Persamaan 3.2 pada Persamaan 3.1. Berikut adalah model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Persamaan Kemiskinan

$$Pov = \alpha_0 - \alpha_1 UMK - \alpha_2 Inv + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 3.1})$$

2. Persamaan Kecepatan Penurunan Kemiskinan Melalui UMK

$$\alpha_1 = \beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 Growth + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 3.2})$$

3. Persamaan *Reduced Form*

$$Pov = \alpha_0 - (\beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 Growth + \varepsilon) UMK - \alpha_2 Inv + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 3.3})$$

$$Pov = \alpha_0 - \beta_0 UMK - \beta_1 UMK_IPM - \beta_2 UMK_Growth - \varepsilon UMK - \alpha_2 Inv + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 3.4})$$

Keterangan:

Pov = Tingkat Kemiskinan (%)

UMK = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

Inv = Rasio PMTB terhadap GDP (%)

UMK_Growth = Interaksi UMK dengan Pertumbuhan Ekonomi (%)

UMK_IPM= interaksi UMK dengan Indeks Pembangunan Manusia (Tahun)

Incomecap= Pendapatan perkapita (Rp)

Anggaran= Belanja Pemerintah Daerah (Rupiah)

α_0 = Konstanta persamaan kemiskinan

α_1, α_2 = Koefisien persamaan kemiskinan

β_0 = Konstanta persamaan kecepatan penurunan kemiskinan melalui UMK

β_1, β_2 = Koefisien persamaan kecepatan penurunan kemiskinan melalui UMK

e = eror persamaan kemiskinan

ϵ = eror persamaan kecepatan penurunan kemiskinan melalui UMK

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Pemilihan Model Data Panel

Data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan pada beberapa individu atau (*unit cross-sectional*) yang merupakan masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (unit waktu) (Baltagi, 2005). Menurut Wanner & Pevalin sebagaimana dikutip oleh Sembodo (2013) menyebutkan bahwa regresi panel merupakan sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon pada data panel. Ada beberapa model regresi panel, salah satunya adalah model dengan slope konstan dan intercept bervariasi. Model regresi panel yang hanya dipengaruhi oleh salah satu unit saja (*unit cross-sectional* atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (*unit cross-sectional* dan unit waktu) disebut model komponen dua arah. Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model dengan pengaruh individu (*fixed effect* dan *random effect*).

Model *common effect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut (Widarjono, 2009). Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro, 2012).

Sementara itu, pengertian model *Fixed Effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy* (Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

Sedangkan *Random Effect* disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*.

Dalam melakukan pengujian panel, diperlukan dua uji, yaitu: (i) Uji Chow dan (ii) Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk memilih model antara *fixed effect* dan *random effect*.

Tabel 4.1: Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Jenis Uji	Prob	Hasil
Chow	0.0000	FEM
Hausman	0.0080	FEM

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa pro hasil uji Chow menunjukkan fixed effect telah mencapai 0.0000 yang artinya signifikan sedangkan uji Hausman mendapatkan hasil 0.0080 yang berarti signifikan. Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, sebagaimana dapat dilihat di lampiran, penelitian ini menggunakan model panel *fixed effect*.

Hasil Statistik Model Fixed Effect

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect, tabel 4.9 menunjukkan hasil statistik tersebut.

Tabel 4.2: Hasil Statistik Model Data Panel Fixed Effect

Kemiskinan	Coefficient	Std. Dev.	P>[t]
UMK	-5.70e-06	2.85e-06	0.054
Distinv	-2.2523436	.0960376	0.013
UMK-IPM	6.73e-08	3.82e-08	0.088
UMK-Pertumbuhan Ekonomi	-2.48e-08	4.81e-08	0.609
Cons	20.7053	2.419363	0.000
Prob>F	0.0000		
R-sq	0.5478		

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diinterpretasikan bahwa model fixed effect pada penelitian menunjukkan $Prob>f=0.0000$ artinya model tersebut signifikan, hal ini bisa dilihat dari semakin kecilnya angka, jika angka sama dengan atau mendekati nol maka model tersebut semakin signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel penelitian tidak bernilai sama dan tidak sama dengan nol. R-sq menunjukkan 0.5478 menunjukkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini bisa menggambarkan variabel dependent sebesar 0.5478 atau 55%

Tiap variabel memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri mulai dari UMK, Distinv UMK-IPM dan UMK Pertumbuhan ekonomi. Di kolom P>[t] dapat digambarkan seberapa signifikan variabel independent mempengaruhi variabel dependent yaitu kemiskinan. Variabel distinv memiliki pengaruh yang paling signifikan dengan P>[t] sebesar 0.013 dan UMK dengan 0.054 lalu UMK-IPM sebesar 0.088. Dari keempat variabel independent hanya variabel UMK-Pertumbuhan Ekonomi yang tidak signifikan yaitu dengan P>[t] sebesar 0.609. Variabel memiliki signifikansi di atas 10% maka dianggap memiliki pengaruh yang minim pada variabel dependent. Dalam penelitian ini, temuan variabel yang tidak signifikan akan dianggap tidak ada karena nilai koefisien tidak memiliki makna atau sama dengan nol.

Lewat koefisien variabel kita dapat menginterpretasikan seberapa besar dampak setiap variabel independent terhadap variabel dependent. Variabel UMK memiliki koefisien sebesar -5.70e-06 artinya setiap kenaikan satu juta rupiah umk dapat mempercepat penurunan kemiskinan sebesar 5.7%. Variabel distinv memiliki koefisien sebesar -2.2523436 yang berfek pada setiap terjadi pertumbuhan investasi di provinsi Jawa Timur sebesar satu persen mengakibatkan kemiskinan berkurang sebesar 0,25%. Dapat diketahui bahwa variabel independent UMK dan distinv memiliki hubungan negative dengan kemiskinan, namun berbeda dengan IPM jika diinteraksikan dengan UMK yang memiliki koefisien sebesar 6.73e-08 yang berdampak pada adanya perlambatan penurunan kemiskinan sebesar 6.73e-08. Untuk variabel UMK-pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien -2.48e-08, namun dikarenakan memiliki probabilitas 0.609 (tidak signifikan) maka koefisien dianggap nol sehingga nilai koefisien tersebut tidak bermakna.

Diskusi dan Pembahasan

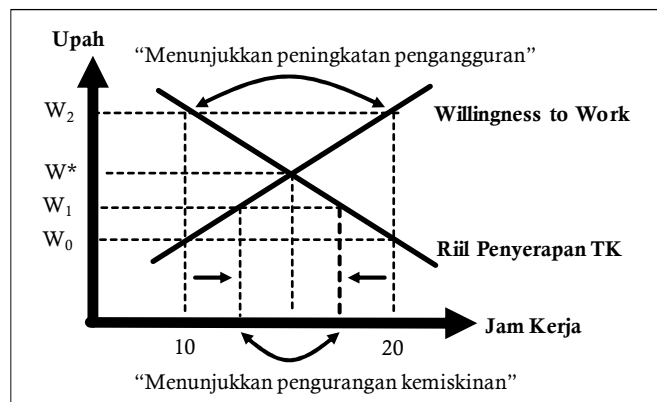
Setelah menelaah hasil statistik Model Panel Fixed Model, selanjutnya akan dilakukan pembahasan merujuk pada variabel UMK dan interaksinya dengan IPM dan pertumbuhan Ekonomi beserta variabel Distinv.

Pengaruh UMK Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan perhitungan pada model regresi data panel, didapatkan hubungan negatif UMK terhadap kemiskinan. Artinya, hipotesis bahwa peningkatan upah dapat menurunkan kemiskinan terbukti. Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan Kaufman. Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Dalam teori Nurske yang terkenal akan lingkaran setan kemiskinannya, peningkatan UMK, dalam hal ini sebagai instrumen modal, juga menstimulus masyarakat untuk bisa menabung. Sehingga, pada titik tertentu masyarakat miskin dapat memperbaiki kualitas hidupnya akibat peningkatan alokasi konsumsi pada sektor investasi pendidikan, kesehatan dan bisnis baru. Sehingga, sangat wajar ketika terjadi peningkatan upah akan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Lebih lanjut, hasil ini menunjukkan bahwa upah di Jawa Timur masih berada di bawah garis keseimbangan. Sehingga, ketika terjadi peningkatan upah, hasrat untuk bekerja semakin tinggi meskipun tetap terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) telah sesuai dengan Teori keputusan untuk bekerja (*A Theory of the Decision to Work*), dimana peningkatan UMK dapat meningkatkan angka partisipasi kerja masyarakat Provinsi Jawa Timur. Peningkatan partisipasi kerja tersebut terjadi karena meningkatnya motivasi masyarakat Jawa Timur untuk mengorbankan leisure/waktu untuk bersenang senang sebagai *opportunity cost* untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjelasan tersebut dapat divisualisasikan melalui Gambar 4.4.

Gambar 4.3: Hubungan Peningkatan Upah Terhadap Penurunan Kemiskinan



Sumber: Tambunan, diolah (2016)

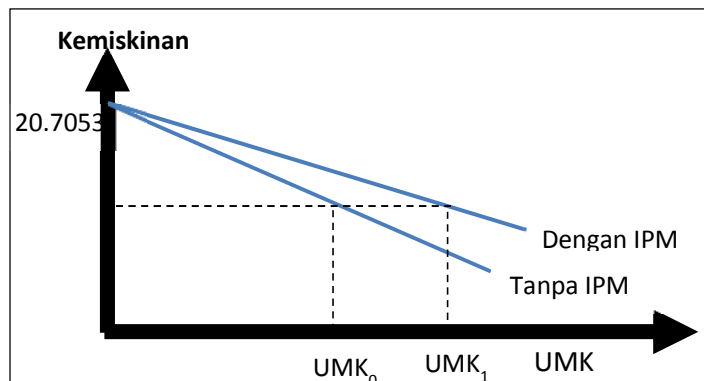
Tingkat upah pada awalnya berada pada W_0 dan berada di bawah upah keseimbangan W^* . Pada titik ini, keinginan untuk bekerja berada pada jam kerja 10 jam. Jika W_0 adalah \$1, maka sebenarnya kebutuhan hidup tenaga kerja adalah sebesar \$10. Seseorang akan masuk ke pasar tenaga kerja ketika kebutuhan mereka di atas 10\$. Pada titik upah yang sama (W_0), digambarkan bahwa penyerapan tenaga kerja riil berada pada 20 jam. Selanjutnya, ketika terjadi peningkatan upah (dari W_0 menjadi W_1), hasrat untuk bekerja akan meningkat sedangkan penyerapan tenaga kerja riil akan turun. Konsep ini sebetulnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan karena nilai kebutuhan minimum tenaga kerja meningkat. Sampai pada titik ini, peningkatan upah di Jawa Timur berada pada jalur yang tepat karena dapat menurunkan kemiskinan.

Pengaruh Interaksi UMK dengan IPM terhadap Kemiskinan

Namun demikian, ketika UMK diinteraksikan dengan IPM, diketahui bahwa dampak UMK dalam menurunkan kemiskinan menjadi semakin lambat. Hal ini terjadi dikarenakan semakin tingginya IPM menandakan akan terjadinya lonjakan kenaikan UMK yang tinggi pula. Lonjakan kenaikan UMK pada gilirannya akan menyebabkan beban perusahaan semakin besar pada input produksi. Sehingga menyebabkan

terjadinya pengurangan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja, khususnya sektor formal yang terkait langsung dengan UMK. Penjelasan tersebut dapat digambarkan melalui grafik 4.5. Dimana semula pengaruh peningkatan upah sebesar 1 juta dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 5.7%, ketika diinteraksikan dengan peningkatan IPM, penurunan kemiskinan menjadi lebih lambat menjadi 5.77%. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perlambatan sebesar 0.07%. Lebih lanjut, perlambatan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM lebih banyak dirasakan oleh masyarakat tidak miskin.

Gambar 4.5: Hubungan Interaksi UMK dan IPM Terhadap Kemiskinan

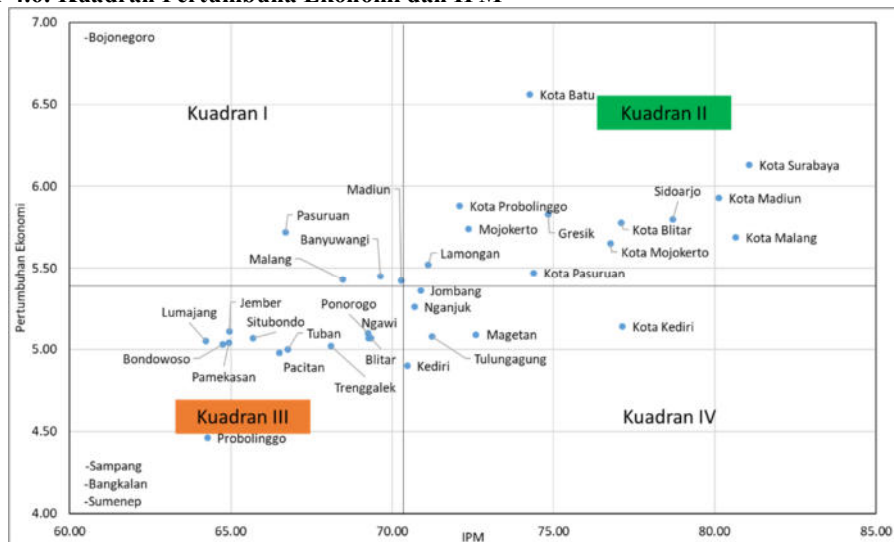


Sumber: Penulis (2019)

Sejalan dengan Teori keputusan untuk bekerja (*A Theory of the Decision to Work*) perlambatan ini tidak, serta merta mutlak untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur namun hanya pada daerah maju dimana, karakteristik daerah maju adalah daerah yang memiliki pertumbuhan dan IPM tinggi. Dalam hal ini, daerah maju biasanya memiliki tingkat upah yang berada di atas keseimbangan. Sehingga, ketika terjadi peningkatan upah di daerah maju maka penurunan tingkat kemiskinan jadi semakin lambat.

Dalam pengembangannya, kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda dalam menyikapi terjadinya interaksi antara IPM terhadap UMK. Selanjutnya hal tersebut akan dijelaskan pada gambar 4.6.

Gambar 4.6: Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan IPM



Sumber: Penulis (2019)

Pada gambar 4.6 dapat dilihat pembentukan kuadran daerah di atas, Kuadran II dengan wilayah IPM dan pertumbuhan tinggi sedangkan pada kuadran III dengan IPM dan pertumbuhan ekonomi

rendah. Dalam teori keinginan untuk bekerja, wilayah pada kuadran II penambahan UMK akan menyebabkan pengangguran bertambah yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Penambahan UMK pada kuadran dua yang mempunyai IPM tinggi akan menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan waktunya untuk bersenang senang (*leisure*) dikarenakan penghasilan yang sudah diatas cukup (*Income Effect*), sehingga strategi peningkatan UMK yang seharusnya mengurangi kemiskinan pada Kuadran II akan *backfire*

Lalu pada kuadran III strategi peningkatan UMK bekerja sangat efektif, hal ini bisa dilihat dengan IPM yang rendah dan aktivitas ekonomi(pertumbuhan Ekonomi) yang rendah, penambahan Stimulus dalam bentuk UMK akan membantu mereka dalam pembentukan modal (pendidikan,Kesehatan,tabungang,DLL) dan pencukupan kehidupan sehari hari. Kuadran III juga menginterpretasikan keadaan pendapatan dibawah garis keseimbangan yang menyebabkan penambahan UMK dapat memotiasi mereka untuk mengalihkan waktu luangnya untuk bekerja daripada bersenang-senang (*leisure*).

Tabel 4.x: Daerah dengan IPM tinggi dan IPM rendah

IPM tinggi	IPM rendah
Lamongan	Sampang
Madiun	Bangkalan
Nganjuk	Sumenep
Jombang	Probolinggo
Tulungagung	Pacitan
Magetan	Tuban
Mojokerto	Trenggalek
Kota Probolinggo	
Kota Batu	
Gresik	
Kota Pasuruan	
Kota Blitar	
Kota Mojokerto	
Sidoarjo	
Kota Madiun	
Kota Surabaya	
Kota Malang	
Kota Kediri	

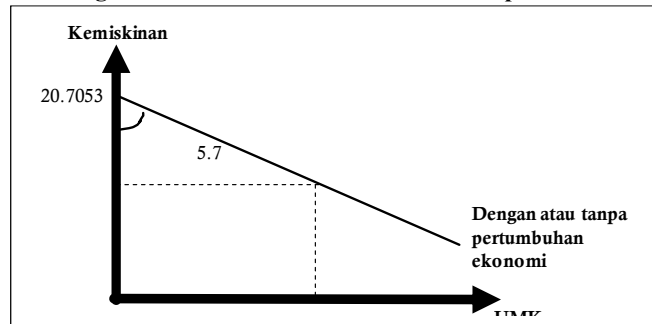
Sumber: data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 50% dari daerah dengan IPM tinggi adalah Kota dan daerah dengan IPM rendah atau dibawah rata-rata diisi oleh kabupaten. hal ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam pertumbuhan IPM antar kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Pengaruh Interaksi UMK dengan Pertumbuhan Ekonomi

Terakhir, ketika UMK diinteraksikan dengan pertumbuhan ekonomi, tidak terdapat perbedaan pengaruh UMK dengan atau tidak adanya pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena tidak terdapat perbedaan jauh pertumbuhan ekonomi antar daerah di Jawa Timur. Secara grafik, penjelasan interaksi UMK dengan pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan pada gambar 4.6 berikut

Gambar 4.6: Hubungan Interaksi UMK dan IPM Terhadap Kemiskinan



Sumber: Penulis (2019)

Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil statistik, hubungan variabel investasi terhadap kemiskinan adalah negatif. Artinya, semakin tinggi nilai investasi, kemiskinan akan berkurang. Menurut Sunariyah (2004), investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Sedangkan Gitman dan Joehnk (2005) dalam bukunya *Fundamentals of Investing* mendefinisikan investasi sebagai berikut: "Investment is any vehicle into which funds can be placed with expectation that it will generate positive income and/or preserve or increase its value".

Berdasarkan hasil statistik, investasi di provinsi Jawa Timur telah terbukti dapat menurunkan kemiskinan akibat meningkatnya aktivitas ekonomi. Investasi yang tinggi, khususnya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, pada gilirannya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sehingga, penduduk miskin yang semula menganggur, akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Pada sisi yang lain, peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong perusahaan mengembangkan bisnisnya. Keadaan perusahaan yang sehat memiliki daya untuk mengembangkan usahanya serta dapat mensejahterahkan tenaga kerjanya di perusahaan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 4 temuan penting yaitu:

1. Upah Jawa Timur masih berada di bawah tingkat keseimbangan, sehingga peningkatan UMK di Jawa Timur dapat menurunkan kemiskinan
2. Daerah dengan tingkat IPM yang tinggi cenderung membutuhkan upah minimum yang lebih tinggi dalam menurunkan kemiskinan
3. Interaksi antara UMK dan Growth tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah di Jawa Timur tidak jauh berbeda.
4. Investasi merupakan faktor kunci selain UMK dalam pengurangan kemiskinan di Jawa Timur. Meningkatnya investasi akan mempercepat aktivitas ekonomi dan menambah lapangan kerja. Sehingga, banyak masyarakat miskin terbebas dari lingkaran kemiskinan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan, maka saran yang direkomendasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upah minimum masih memungkinkan untuk dilakukan di Jawa Timur, namun perlu disikapi dengan kehati-hatian terutama pada daerah dengan tingkat IPM yang Tinggi.
2. Peningkatan upah harus dikontrol dengan menyesuaikan terhadap kondisi upah yang berada dibawah/diatas keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. 2001. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Yustika, Ahmad. 2012. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Alaniz et al. 2011. *The impact of minimum wages on wages, work and poverty in Nicaragua*. *Labour Economics*, Volume 18, 545-559.
- Friedman, J. 1979. *Urban Poverty in America Latin, Some Theoretical Considerations*, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed). 1986. *Kemiskinan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gall, G.1998. *The Development of the Indonesian Labour Movement*. *International Journal of Human Resources Management*. 9(2). 359-36.
- Gitman, Lawrence J. dan Michael D. Joehnk. 2005. *Fundamental Of Investing*, 9th edition. Pearson.
- Gunjarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong., RC. Salemba 4, Buku 2, Edisi 5. Jakarta.
- Hart, Keith, 1973. *Informal Income opportunities and urban employment in Ghana*. *Journal of Modern African Studies*. 11 (1): 61 -69
- Hunt, E.K. 1992. *History of Economic Thought*. New York: Harper-Collins Publishers.
- Kaufman, Bruce E dan Hotchkiss Julie L. 1999. *The Economics of Labor Markets*. Fifth Edition, The Dryden Press.
- Kaufman, Bruce, 2000, *The Economics of Labor Markets, Fifth Edition*. New York: The Dryden Press.
- Kuncoro, M. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miranti, R. et al. 2013. *Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia*, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 148, OECD Publishing, Paris.
- Mulyani, A. dan Noor, M. 2011. *Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Pertanian di Lahan Gambut*. Balai Penelitian Tanah. Bogor. 27-44 hal.
- Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Diklat Mata Kuliah Program Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- OECD. (196), 'Public expenditure on income maintenance programmes'.
- OECD. (2013), *Development Co-operation Report 2013: Ending Poverty*, OECD Publishing.
- Persatuan Bangsa-Bangsa. 1995. *The copenhagen declaration and programme of action: world summit for social development 6-12 march 1995*. New York: United Nations 1995.
- Pratomo, DS. Dan Saputra, PMA. (2011). *Kebijakan upah minimum untuk perkeekonomian yang berkeadilan: tinjauan UUD 1945*. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 (2), 269-295.
- Rochaeni, S. dan E. Lakollo. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah tangga Petani di Kelurahan Setugede Kota Bogor*. *Jurnal Agro Ekonomi*, 23 (2) : 133 – 158.
- Romi dan Umiyati. (2018). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi*, *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. (1), 1.
- Karl and Murray. 2011. *Minimum Wages And Household Poverty: General Equilibrium Macro-Micro Simulations for South Africa*. ELSEVIER. Vol. 40, No. 4, pp. 771-783, 2012.
- Saari et al. 2016. *Estimating the Impact of Minimum Wages on Poverty Across Ethnic Groups in Malaysia*. ELSEVIER.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunariyah. 2004. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Edisi Kelima. Bandung: CV Alfabeta
- Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., Sumarto, S. 2003. *Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 39(1), 29-50.
- Sutikno et al. 2019. *Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 19 (1), 88-98.
- Tambunan, T. 2016. *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta: LP3S

- Todaro dan Smith. 2010. *Pembangunan ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, M, P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Yogyakarta:EKONISIA.
- Wirosuhardjo, Kartomo, et.al. 1986, *Urbanization and Urban Policies: Lessons Learned From East and Southeast Asian Experiences*. Jakarta: State Ministry For Population and Environment.
- Zaghoudi, T. dan Hakimi, A, (2011). *Does external debt- poverty relationship confirm the debtoverhang hypothesis for developing counties?*, *Economics Bulletin*, Volume 3, Issue 2, 653-665
- Zain, G. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Zuhdiyati dan Kaluge. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir (studi pada 33 provinsi)*. JIBEKA. Vol. 11 (2), 2-31.